

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBAYARAN BIAYA PENGUMPUL DATA
PETUGAS PENGOLAH DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, maka dipandang perlu untuk membuat pedoman umum tentang tata cara pembayaran biaya pengumpul data sebagai acuan pembayaran oleh Unit Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dinilai perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pembayaran Biaya Pengumpul Data Petugas Pengolah Data;

- Mengingat : 1. Pasal ayat (...) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBAYARAN BIAYA PENGUMPUL DATA PETUGAS PENGOLAH DATA.

KESATU : Menetapkan pedoman umum biaya pengumpul data petugas pengolah data sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Umum Pembayaran Biaya Pengumpul Data Petugas Pengolah Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Unit Data Eselon I dalam melakukan pembayaran kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas pengolah data.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TENTANG PEDOMAN UMUM

PEMBAYARAN BIAYA PENGUMPULAN DATA
PETUGAS PENGOLAH DATA

PEDOMAN UMUM

PEMBAYARAN BIAYA PENGUMPULAN DATA PETUGAS
PENGOLAH DATA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai bagian dari amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data di bidang kelautan dan perikanan.

Data Statistik merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyusun suatu perencanaan serta kebijakan. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan dituntut perubahannya dengan data-data *update*, *real time* dan akuntabel. Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusia penyelenggara statistik, baik dari pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian.

Data statistik yang dimaksud harus memenuhi standar kecukupan sampel per jenis homogenitas data, dan tervalidasi, dimana hal tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia penyelenggara statistik, baik dari kegiatan penumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian. Dimana sumber daya manusia yang dimaksud adalah Pengolah Data Kelautan dan Perikanan.

Pengolah Data Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT), Tenaga Honorer yang berada di UPT dan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Data Kementerian.

Pengolah Data bertugas mengumpulkan dan mencatat data kelautan dan perikanan secara lengkap dan akurat menggunakan kuesioner Satu Data Kelautan dan Perikanan sesuai dengan wilayah kerjanya, serta memasukan data (input data) ke Aplikasi Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Untuk mendapatkan data kelautan dan perikanan yang berkualitas, maka dibutuhkan Biaya Pengumpulan Data bagi Pengolah Data Kelautan dan Perikanan. BPD ini digunakan untuk biaya transportasi pengumpulan kunjungan responden data ke lapangan, biaya penggandaan kuesioner, serta biaya komunikasi/akses internet, dan biaya lain yang dibutuhkan dalam rangka proses pengumpulan data memasukan data (input data) ke Aplikasi. Agar terdapat keseragaman pada mekanisme pembayaran BPD maka diperlukan adanya Pedoman Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Pengolah Data.

Maksud dan Tujuan

Pedoman Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Pengolah Data ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Unit Data Kementerian terkait dalam melaksanakan pembayaran Biaya Pengumpulan Data Pengolah Data.

Tujuan dari pedoman ini adalah :

1. Menjamin tertibnya pemanfaatan anggaran Biaya Pengumpulan Data Pengolah Data dalam rangka tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengumpulan data dan informasi kelautan dan perikanan.

DRAFT

BAB II

PEDOMAN PEMBAYARAN BIAYA PENGUMPULAN DATA

PETUGAS PENGOLAH DATA

Dalam melaksanakan Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Petugas Pengolah Data, terdapat beberapa hal yang dijadikan pedoman, yaitu:

A. Mekanisme Pembayaran BPD PPD

Mekanisme pembayaran BPD PPD adalah sebagai berikut :

1. BPD dibayarkan kepada PPD dan petugas Pelabuhan Perikanan untuk entri data ke Aplikasi dengan basis bulan entri (bukan bulan produksi) dan berdasarkan rekap entri data KUSUKA dan Data Produksi yang ditarik secara elektronik dari Aplikasi (Rekap Entri);
2. BPD untuk KUSUKA akan dibayarkan bagi entri data pada Rekap Entri sesuai ketentuan berikut :
 - a. **Blok Umum** berstatus *Valid* bagi KUSUKA Perorangan; dan
 - b. **Blok Umum** berstatus minimal *Submitted* (Final) bagi KUSUKA Korporasi.
3. BPD untuk Produksi akan dibayarkan bagi entri data pada Rekap Entri sesuai ketentuan berikut :
 - a. Berstatus "*submitted*" dan/atau "*valid*";
 - b. Berstatus entri/input baru, bukan hasil *update* atau revisi (hanya bisa dibayarkan satu kali per entri kuesioner);
 - c. Periode input tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah bulan hasil produksi, untuk menjaga keakurasian data hasil inputan;
 - d. Besaran maksimal BPD yang dapat dibayarkan untuk kuesioner Pendataan Volume dan Harga Ikan di Tingkat Grosir (HG-H) dan/atau kuesioner Pendataan Volume dan Harga Ikan di Tingkat Eceran (HE-H) adalah 20 (dua puluh) kuesioner per bulan, yang dikumpulkan dari 4 (empat) minggu yang berbeda dengan minimal 5 (lima) orang responden pedagang pasar yang berbeda;
 - e. Target sampling/produksi yang dapat dibayarkan per bulan maksimal adalah 100 input.

4. Pengkategorian skema BPD untuk kuesioner Data Produksi menjadi berdasarkan jenis kuesioner, yaitu “Kuesioner selain PT-H” dan “Kuesioner PT-H”.

B. Satuan Besaran BPD

Satuan besaran BPD per kuesioner dihitung berdasarkan setiap data entri kuesioner KUSUKA dan Data Produksi yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan Besaran BPD PPD dan Petugas Pelabuhan Perikanan per Kuesioner KUSUKA/ *Listing* :

Kategori Petugas	Besaran BPD
PPD	Rp 5000,- / kuesioner
Petugas Pelabuhan Perikanan	Rp 5000,- / kuesioner

2. Satuan Besaran BPD PPD per Kuesioner Data Produksi (Kuesioner selain PT-H atau Non-Pelabuhan) :

Wilayah Kerja	Besaran BPD
Wilayah Kerja A	Rp 10.000,- / kuesioner
Wilayah Kerja B	Rp 15.000,- / kuesioner
Wilayah Kerja C	Rp 20.000,- / kuesioner

3. Satuan besaran BPD Petugas Pelabuhan Perikanan per Kuesioner Data Transaksi/Produksi (Kuesioner PT-H atau Pelabuhan) :

Tonnage Kapal	Besaran BPD
Tonnage Kapal < 5 GT	Rp 2500,- / kuesioner
Tonnage Kapal 5 – 10 GT	Rp 3000,- / kuesioner
Tonnage Kapal 10 – 30 GT	Rp 4000,- / kuesioner

<i>Tonnage Kapal</i>	<i>Besaran BPD</i>
<i>Tonnage Kapal > 30 GT</i>	Rp 5000,- / kuesioner

C. Pembagian Wilayah Kerja

Pembagian Wilayah Kerja sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kerja A

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Barat
2.		Kabupaten Aceh Barat Daya
3.		Kabupaten Aceh Besar
4.		Kabupaten Aceh Jaya
5.		Kabupaten Aceh Selatan
6.		Kabupaten Aceh Singkil
7.		Kabupaten Aceh Tamiang
8.		Kabupaten Aceh Tengah
9.		Kabupaten Aceh Tenggara
10.		Kabupaten Aceh Timur
11.		Kabupaten Aceh Utara
12.		Kabupaten Bener Meriah
13.		Kabupaten Bireuen
14.		Kabupaten Gayo Lues
15.		Kabupaten Nagan Raya
16.		Kabupaten Pidie
17.		Kabupaten Pidie Jaya
18.		Kabupaten Simeulue

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
19.		Kota Banda Aceh
20.		Kota Langsa
21.		Kota Lhokseumawe
22.		Kota Sabang
23.		Kota Subulussalam
24.	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan
25.		Kabupaten Batubara
26.		Kabupaten Dairi
27.		Kabupaten Deli Serdang
28.		Kabupaten Humbang Hasundutan
29.		Kabupaten Karo
30.		Kabupaten Labuhan Batu
31.		Kabupaten Labuhanbatu Utara
32.		Kabupaten Langkat
33.		Kabupaten Mandailing Natal
34.		Kabupaten Nias
35.		Kabupaten Nias Barat
36.		Kabupaten Nias Selatan
37.		Kabupaten Nias Utara
38.		Kabupaten Padang Lawas
39.		Kabupaten Padang Lawas Utara
40.		Kabupaten Pakpak Bharat
41.		Kabupaten Samosir
42.		Kabupaten Serdang Bedagai

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
43.		Kabupaten Simalungun.	
44.		Kabupaten Tapanuli Selatan	
45.		Kabupaten Tapanuli Tengah	
46.		Kabupaten Tapanuli Utara	
47.		Kabupaten Toba Samosir	
48.		Kabupetan Labuhanbatu Selatan	
49.		Kota Binjai	
50.		Kota Gunung Sitoli	
51.		Kota Medan	
52.		Kota Padang Sidempuan	
53.		Kota Pematang Siantar	
54.		Kota Sibolga	
55.		Kota Tanjung Balai	
56.		Kota Tebing Tinggi	
57.		Sumatera Barat	Kabupaten Agam
58.			Kabupaten Dharmasraya
59.	Kabupaten Lima Puluh Kota		
60.	Kabupaten Padang Pariaman		
61.	Kabupaten Pasaman		
62.	Kabupaten Pasaman Barat		
63.	Kabupaten Pesisir Selatan		
64.	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung		
65.	Kabupaten Solok		
66.	Kabupaten Solok Selatan		

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
67.		Kabupaten Tanah Datar
68.		Kota Bukit Tinggi
69.		Kota Padang
70.		Kota Padang Panjang
71.		Kota Pariaman
72.		Kota Payakumbuh
73.		Kota Sawahlunto
74.		Kota Solok
75.	Riau	Kabupaten Bengkalis
76.		Kabupaten Indragiri Hilir
77.		Kabupaten Indragiri Hulu
78.		Kabupaten Kampar
79.		Kabupaten Kuantan Singingi
80.		Kabupaten Pelalawan
81.		Kabupaten Rokan Hilir
82.		Kabupaten Rokan Hulu
83.		Kabupaten Siak
84.		Kota Dumai
85.		Kota Pekanbaru
86.	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan
87.		Kabupaten Karimun
88.		Kabupaten Lingga
89.		Kota Batam
90.		Kota Tanjung Pinang

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
91.	Jambi	Kabupaten Batang Hari
92.		Kabupaten Bungo
93.		Kabupaten Kerinci
94.		Kabupaten Merangin
95.		Kabupaten Muaro Jambi
96.		Kabupaten Sarolangun
97.		Kabupaten Tanjung Jabung Barat
98.		Kabupaten Tanjung Jabung Timur
99.		Kabupaten Tebo
100.		Kota Jambi
101.		Kota Sungai Penuh
102.	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin
103.		Kabupaten Empat Lawang
104.		Kabupaten Lahat
105.		Kabupaten Muara Enim
106.		Kabupaten Musi Banyuasin
107.		Kabupaten Musi Rawas
108.		Kabupaten Musi Rawas Utara
109.		Kabupaten Ogan Ilir
110.		Kabupaten Ogan Komering Ilir
111.		Kabupaten Ogan Komering Ulu
112.		Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
113.		Kabupaten Ogan Komering Ulu

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
		Timur
114.		Kabupaten Pali
115.		Kota Lubuk Linggau
116.		Kota Pagar Alam
117.		Kota Palembang
118.		Kota Prabumulih
119.	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan
120.		Kabupaten Bengkulu Tengah
121.		Kabupaten Bengkulu Utara
122.		Kabupaten Kaur
123.		Kabupaten Kepahiang
124.		Kabupaten Lebong
125.		Kabupaten Mukomuko
126.		Kabupaten Rejang Lebong
127.		Kabupaten Seluma
128.		Kota Bengkulu
129.	Lampung	Kabupaten Lampung Barat
130.		Kabupaten Lampung Selatan
131.		Kabupaten Lampung Tengah
132.		Kabupaten Lampung Timur
133.		Kabupaten Lampung Utara
134.		Kabupaten Mesuji
135.		Kabupaten Pesawaran
136.		Kabupaten Pesisir Barat
137.		Kabupaten Pringsewu

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
138.		Kabupaten Tanggamus
139.		Kabupaten Tulang Bawang
140.		Kabupaten Tulang Bawang Barat
141.		Kabupaten Way Kanan
142.		Kota Bandar Lampung
143.		Kota Metro
144.		Kepulauan Bangka Belitung
145.	Kabupaten Bangka Barat	
146.	Kabupaten Bangka Selatan	
147.	Kabupaten Bangka Tengah	
148.	Kabupaten Belitung	
149.	Kabupaten Belitung Timur	
150.	Kota Pangkalpinang	
151.	Banten	Kabupaten Lebak
152.		Kabupaten Pandeglang
153.		Kabupaten Serang
154.		Kabupaten Tangerang
155.		Kota Cilegon
156.		Kota Serang
157.		Kota Tangerang Selatan
158.		Kota Tangerang
159.	DKI Jakarta	Kabupaten Kepulauan Seribu
160.		Kota Jakarta Barat
161.		Kota Jakarta Pusat

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
162.		Kota Jakarta Selatan
163.		Kota Jakarta Timur
164.		Kota Jakarta Utara
165.	Jawa Barat	Kabupaten Bandung
166.		Kabupaten Bandung Barat
167.		Kabupaten Bekasi
168.		Kabupaten Bogor
169.		Kabupaten Ciamis
170.		Kabupaten Cianjur
171.		Kabupaten Cirebon
172.		Kabupaten Garut
173.		Kabupaten Indramayu
174.		Kabupaten Karawang
175.		Kabupaten Kuningan
176.		Kabupaten Majalengka
177.		Kabupaten Pangandaran
178.		Kabupaten Purwakarta
179.		Kabupaten Subang
180.		Kabupaten Sukabumi
181.		Kabupaten Sumedang
182.		Kabupaten Tasikmalaya
183.		Kota Bandung
184.		Kota Banjar
185.	Kota Bekasi	

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
186.		Kota Bogor
187.		Kota Cimahi
188.		Kota Cirebon
189.		Kota Depok
190.		Kota Sukabumi
191.		Kota Tasikmalaya
192.	Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara
193.		Kabupaten Banyumas
194.		Kabupaten Batang
195.		Kabupaten Blora
196.		Kabupaten Boyolali
197.		Kabupaten Brebes
198.		Kabupaten Cilacap
199.		Kabupaten Demak
200.		Kabupaten Grobogan
201.		Kabupaten Jepara
202.		Kabupaten Karanganyar
203.		Kabupaten Kebumen
204.		Kabupaten Kendal
205.	Kabupaten Klaten	
206.	Kabupaten Kudus	
207.	Kabupaten Magelang	
208.	Kabupaten Pati	
209.	Kabupaten Pekalongan	

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
210.		Kabupaten Pemalang	
211.		Kabupaten Purbalingga	
212.		Kabupaten Purworejo	
213.		Kabupaten Rembang	
214.		Kabupaten Semarang	
215.		Kabupaten Sragen	
216.		Kabupaten Sukoharjo	
217.		Kabupaten Tegal	
218.		Kabupaten Temanggung	
219.		Kabupaten Wonogiri	
220.		Kabupaten Wonosobo	
221.		Kota Magelang	
222.		Kota Pekalongan	
223.		Kota Salatiga	
224.		Kota Semarang	
225.		Kota Surakarta	
226.		Kota Tegal	
227.		DI Yogyakarta	Kabupaten Bantul
228.			Kabupaten Gunung Kidul
229.			Kabupaten Kulonprogo
230.	Kabupaten Sleman		
231.	Kota Yogyakarta		
232.	Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	
233.		Kabupaten Banyuwangi	

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
234.		Kabupaten Blitar
235.		Kabupaten Bojonegoro
236.		Kabupaten Bondowoso
237.		Kabupaten Gresik
238.		Kabupaten Jember
239.		Kabupaten Jombang
240.		Kabupaten Kediri
241.		Kabupaten Lamongan
242.		Kabupaten Lumajang
243.		Kabupaten Madiun
244.		Kabupaten Magetan
245.		Kabupaten Malang
246.		Kabupaten Mojokerto
247.		Kabupaten Nganjuk
248.		Kabupaten Ngawi
249.		Kabupaten Pacitan
250.		Kabupaten Pamekasan
251.		Kabupaten Pasuruan
252.		Kabupaten Ponorogo
253.		Kabupaten Probolinggo
254.		Kabupaten Sampang
255.		Kabupaten Sidoarjo
256.		Kabupaten Situbondo
257.		Kabupaten Sumenep

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
258.		Kabupaten Trenggalek
259.		Kabupaten Tuban
260.		Kabupaten Tulungagung
261.		Kota Batu
262.		Kota Blitar
263.		Kota Kediri
264.		Kota Madiun
265.		Kota Malang
266.		Kota Mojokerto
267.		Kota Pasuruan
268.		Kota Probolinggo
269.		Kota Surabaya
270.		Bali
271.	Kabupaten Bangli	
272.	Kabupaten Buleleng	
273.	Kabupaten Gianyar	
274.	Kabupaten Jembrana	
275.	Kabupaten Karang Asem	
276.	Kabupaten Klungkung	
277.	Kabupaten Tabanan	
278.	Kota Denpasar	

2. Wilayah Kerja B

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
-----	----------	----------------

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima
2.		Kabupaten Dompu
3.		Kabupaten Lombok Barat
4.		Kabupaten Lombok Tengah
5.		Kabupaten Lombok Timur
6.		Kabupaten Lombok Utara
7.		Kabupaten Sumbawa
8.		Kabupaten Sumbawa Barat
9.		Kota Bima
10.		Kota Mataram
11.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Alor
12.		Kabupaten Belu
13.		Kabupaten Ende
14.		Kabupaten Flores Timur
15.		Kabupaten Kupang
16.		Kabupaten Lembata.
17.		Kabupaten Malaka
18.		Kabupaten Manggarai
19.		Kabupaten Manggarai Barat
20.		Kabupaten Manggarai Timur
21.		Kabupaten Nagekeo
22.		Kabupaten Ngada
23.		Kabupaten Sabu Raijua
24.		Kabupaten Sikka

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
25.		Kabupaten Sumba Barat
26.		Kabupaten Sumba Barat Daya
27.		Kabupaten Sumba Tengah
28.		Kabupaten Timor Tengah Selatan
29.		Kabupaten Timor Tengah Utara
30.		Kota Kupang
31.		Kalimantan Barat
32.	Kabupaten Kapuas Hulu	
33.	Kabupaten Kayong Utara	
34.	Kabupaten Ketapang	
35.	Kabupaten Kubu Raya	
36.	Kabupaten Landak	
37.	Kabupaten Melawi	
38.	Kabupaten Mempawah	
39.	Kabupaten Sambas	
40.	Kabupaten Sanggau	
41.	Kabupaten Sekadau	
42.	Kabupaten Sintang	
43.	Kota Pontianak	
44.	Kota Singkawang	
45.	Kalimantan Selatan	Kabupaten Balangan
46.		Kabupaten Banjar
47.		Kabupaten Barito Kuala
48.		Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
49.		Kabupaten Hulu Sungai Tengah
50.		Kabupaten Hulu Sungai Utara
51.		Kabupaten Kota Baru
52.		Kabupaten Tabalong
53.		Kabupaten Tanah Bumbu
54.		Kabupaten Tanah Laut
55.		Kabupaten Tapin
56.		Kota Banjar Baru
57.		Kota Banjarmasin
58.	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan
59.		Kabupaten Barito Timur
60.		Kabupaten Barito Utara
61.		Kabupaten Gunung Mas
62.		Kabupaten Kapuas
63.		Kabupaten Katingan
64.		Kabupaten Kotawaringin Barat
65.		Kabupaten Kotawaringin Timur
66.		Kabupaten Lamandau
67.		Kabupaten Murung Raya
68.		Kabupaten Pulang Pisau
69.		Kabupaten Seruyan
70.		Kabupaten Sukamara
71.		Kota Palangkaraya
72.	Kalimantan Timur	Kabupaten Berau

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
73.		Kabupaten Kutai Barat	
74.		Kabupaten Kutai Kartanegara	
75.		Kabupaten Kutai Timur	
76.		Kabupaten Mahakam Ulu	
77.		Kabupaten Paser	
78.		Kabupaten Penajam Paser Utara	
79.		Kota Balikpapan	
80.		Kota Bontang	
81.		Kota Samarinda	
82.		Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan
83.			Kabupaten Malinau
84.	Kabupaten Tana Tidung		
85.	Kota Tarakan		
86.	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	
87.		Kabupaten Mamasa	
88.		Kabupaten Mamuju	
89.		Kabupaten Mamuju Tengah	
90.		Kabupaten Pasangkayu	
91.		Kabupaten Polewali Mandar	
92.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	
93.		Kabupaten Barru	
94.		Kabupaten Bone	
95.		Kabupaten Bulukumba	
96.		Kabupaten Enrekang	

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
97.		Kabupaten Gowa
98.		Kabupaten Jenepono
99.		Kabupaten Luwu
100.		Kabupaten Luwu Timur
101.		Kabupaten Luwu Utara
102.		Kabupaten Maros
103.		Kabupaten Pinrang
104.		Kabupaten Sidenreng Rappang
105.		Kabupaten Sinjai
106.		Kabupaten Soppeng
107.		Kabupaten Takalar
108.		Kabupaten Tana Toraja
109.		Kabupaten Toraja Utara
110.	Kabupaten Wajo	
111.	Kota Makassar	
112.	Kota Palopo	
113.	Kota Parepare	
114.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai
115.		Kabupaten Banggai Laut
116.		Kabupaten Buol
117.		Kabupaten Donggala
118.		Kabupaten Morowali
119.		Kabupaten Morowali Utara
120.		Kabupaten Parigi Moutong

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota
121.		Kabupaten Poso
122.		Kabupaten Sigi
123.		Kabupaten Tojo Una Una
124.		Kabupaten Toli Toli
125.		Kota Palu
126.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana
127.		Kabupaten Buton
128.		Kabupaten Buton Selatan
129.		Kabupaten Buton Tengah
130.		Kabupaten Buton Utara
131.		Kabupaten Kolaka
132.		Kabupaten Kolaka Timur
133.		Kabupaten Kolaka Utara
134.		Kabupaten Konawe
135.		Kabupaten Konawe Selatan
136.		Kabupaten Konawe Utara
137.		Kabupaten Muna
138.		Kabupaten Muna Barat
139.		Kabupaten Wakatobi
140.		Kota Bau Bau
141.	Kota Kendari	
142.	Sulawesi Utara	Kab. Boloang Mongondow
143.		Kab. Minahasa
144.		Kab. Minahasa Selatan

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
145.		Kabupaten Bolaang Monggondow Selatan	
146.		Kabupaten Bolaang Monggondow Timur	
147.		Kabupaten Bolaang Monggondow Utara	
148.		Kabupaten Minahasa Tenggara	
149.		Kabupaten Minahasa Utara	
150.		Kota Bitung	
151.		Kota Manado	
152.		Kota Mobagu	
153.		Kota Tomohon	
154.		Gorontalo	Kabupaten Boalemo
155.			Kabupaten Bone Bolango
156.			Kabupaten Gorontalo
157.			Kabupaten Gorontalo Utara
158.	Kabupaten Pohuwato		
159.	Kota Gorontalo		
160.	Maluku	Kota Ambon	
161.		Kota Tual	
162.	Maluku Utara	Kota Ternate	
163.		Kota Tidore Kepulauan	
164.	Papua	Kota Jayapura	
165.	Papua Barat	Kota Sorong	

3. Wilayah Kerja C

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	Sumatera Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2.	Riau	Kepulauan Meranti
3.	Kepulauan Riau	Kabupaten Kepulauan Anambas
4.		Kabupaten Natuna
5.	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Rote Ndao
6.		Kabupaten Sumba Timur
7.	Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan
8.	Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar
9.		Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
10.	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan
11.	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Kepulauan
12.	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe
13.		Kabupaten Kepulauan Talaud
14.		Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
15.		Maluku
16.		Kabupaten Buru Selatan
17.		Kabupaten Kepulauan Aru
18.		Kabupaten Maluku Barat Daya
19.		Kabupaten Maluku Tengah
20.		Kabupaten Maluku Tenggara
21.		Kabupaten Maluku Tenggara Barat
22.		Kabupaten Seram Bagian Barat

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	
23.		Kabupaten Seram Bagian Timur	
24.	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Barat	
25.		Kabupaten Halmahera Selatan	
26.		Kabupaten Halmahera Tengah	
27.		Kabupaten Halmahera Timur	
28.		Kabupaten Halmahera Utara	
29.		Kabupaten Kepulauan Sula	
30.		Kabupaten Pulau Morotai	
31.		Kabupaten Taliabu	
32.		Papua	Kabupaten Asmat
33.			Kabupaten Biak Numfor
34.	Kabupaten Boven Digul		
35.	Kabupaten Deiyai		
36.	Kabupaten Dogiyan		
37.	Kabupaten Intan Jaya		
38.	Kabupaten Jayapura		
39.	Kabupaten Jayawijaya		
40.	Kabupaten Keerom		
41.	Kabupaten Lanny Jaya		
42.	Kabupaten Mamberamo Raya		
43.	Kabupaten Mamberamo Tengah		
44.	Kabupaten Mappi		
45.	Kabupaten Marauke		
46.	Kabupaten Mimika		

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
47.		Kabupaten Nabire
48.		Kabupaten Nduga
49.		Kabupaten Paniai
50.		Kabupaten Pegunungan Bintang
51.		Kabupaten Puncak
52.		Kabupaten Puncak Jaya
53.		Kabupaten Sarmi
54.		Kabupaten Supiori
55.		Kabupaten Tolikara
56.		Kabupaten Waropen
57.		Kabupaten Yahukimo
58.		Kabupaten Yalimo
59.		Kabupaten Yapen Waropen
60.	Papua Barat	Kabupaten Fak Fak
61.		Kabupaten Kaimana
62.		Kabupaten Manokwari
63.		Kabupaten Manokwari Selatan
64.		Kabupaten Maybrat
65.		Kabupaten Pegunungan Arfak
66.		Kabupaten Raja Ampat
67.		Kabupaten Sorong
68.		Kabupaten Sorong Selatan
69.		Kabupaten Tambrau
70.		Kabupaten Teluk Bintuni

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
71.		Kabupaten Teluk Wondama

BAB III PENUTUP

Pedoman Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Petugas Pengolah Data ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Unit Data Eselon I, sehingga dapat membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Petugas Pengolah Data. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengumpulan Data Petugas Pengolah Data akan dievaluasi perkembangan dan dinamikanya oleh Pusdatin, sebagai Unit Data Kementerian dalam penerapannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO